

ISBN : 979-8253-55-8

Konsep **Usahatani Kooperatif** (Cooperative Farming)

TRA

**143
L**



Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Konsep

Usahatani Kooperatif (Cooperative Farming)

632.143
BAL
K

Penulis :
Heru Sutikno

Redaksi Pelaksana :
Murzani
Latif Nurul I.
A. Humaidi



Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

PENGANTAR

Lahan pasang surut yang memiliki potensi besar sebagai pengganti lahan pertanian yang hilang di Jawa, pengembangannya mengalami hambatan baik teknis maupun sosial ekonomi. Gangguan hama penyakit, terutama tikus, dan degradasi lahan yang semakin meluas, merupakan tantangan teknis, sedangkan kekurangan modal dan tenaga merupakan hambatan ekonomi utama. Selain itu, rendahnya minat anak petani untuk menggantikan orang tuanya dalam mengelola usahatani, dalam jangka menengah (10-15 tahun kedepan) akan menjadi masalah serius yang menyebabkan lahan tidak termanfaatkan dengan optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut Balittra melakukan rekayasa kelembagaan yang disebut Usahatani Kooperatif, sebagai lembaga tingkat petani yang menghimpun usahatani dalam satu kesatuan aksi, mulai dari perencanaan, penyediaan sarana dan pemeliharaan prasarana produksi, aplikasi teknologi sampai pemasaran hasil. Konsep usahatani kooperatif berbeda dengan *Corporate Farming*. Hambatan-hambatan psikologis mengenai status pemilikan lahan dan penguasaan hasil diperbaiki dalam usahatani kooperatif. Konsep ini bukan harga mati dalam arti penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan adat setempat masih memungkinkan untuk dilakukan.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pengembangan pertanian di lahan pasang surut.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
PENDAHULUAN	1
VISI DAN MISI	3
Visi	3
Misi	3
BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1. Bentuk Organisasi	4
2. Struktur Organisasi	6
3. Mekanisme Kerja	9
SUMBER DANA	10
MANAJEMEN ORGANISASI	11
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	11
2. Pengorganisasian	13
3. Pelaksanaan	14
4. Pengendalian	14
PENGEMBANGAN LEMBAGA	14
Perspektif ke depan	14
Masalah pengembangan	16
PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahan pasang surut menjadi semakin penting peranannya bagi pertanian Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan keamanan pangan nasional. Beralih fungsinya lahan-lahan sawah di Jawa yang telah mencapai lebih dari satu juta hektar menjadikan lahan pasang surut menjadi tumpuan harapan untuk mengkompensasi hilangnya produksi pangan, khususnya beras, dari daerah tersebut. Lahan ini dirasa semakin penting apabila terjadi kemarau panjang di Jawa dan daerah produsen pangan lainnya.

Lahan pasang surut dibalik berbagai kekurangannya, seperti keasaman lahan tinggi, miskin hara (Widjaja-Adhi *et al*, 1992), dan intensitas gangguan hama penyakit dan gulma yang tinggi (Ismail *et al*, 1994), memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan air. Pada saat lahan kering dan tadah hujan, bahkan sebagian lahan irigasi, tak mungkin lagi diusahakan karena kekurangan air, lahan pasang surut masih mungkin diusahakan dengan berbagai komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian tidak mudah dilakukan karena selain kendala dan masalah teknis tersebut di atas, masalah sosial ekonomi dan kelembagaan merupakan masalah yang cukup berat untuk dihadapi. Petani pasang surut yang hampir semuanya pendatang, umumnya berasal dari lapisan ekonomi paling lemah di daerah asalnya, sehingga kekurangan modal merupakan hal yang masih dihadapi sampai saat ini. Kepadatan penduduk daerah pasang surut yang relatif rendah menyebabkan kekurangan tenaga kerja selalu dirasakan terutama

pada saat musim sibuk, seperti pengolahan tanah, tanam dan panen. Lemahnya kelembagaan pendukung pertanian menyebabkan sulitnya petani mencari sumber permodalan dan pemasaran hasil panen. Sistem pemasaran yang ada umumnya berskala lokal tidak mendukung pengembangan pertanian, terutama peningkatan produksi pangan dengan varietas unggul, karena preferensi konsumen lokal adalah padi lokal. Padahal, Provinsi Kalimantan Timur yang masih defisit produksi pangannya dapat menjadi tujuan pemasaran beras unggul asal Kalimantan Selatan.

Hal yang paling merisaukan adalah generasi muda pedesaan (anak-anak petani) sangat sedikit yang tertarik untuk menjadi petani, karena pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya. Hampir semua anak-anak petani yang menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ke atas bercita-cita untuk bekerja di sektor industri dan jasa yang ada di kota terdekat, menjadi polisi, pegawai negeri sipil, dsb. Dalam jangka menengah (15-20 tahun ke depan) saat rata-rata petani mencapai umur 65 tahun atau lebih, dikhawatirkan akan terjadi krisis manajemen usahatani, terutama tanaman pangan. Selain itu, kesempatan kerja yang terbuka relatif luas di kota sekitarnya, menyebabkan sebagian petani lebih suka bekerja di kota meninggalkan lahannya setelah selesai tanam. Akibatnya, serangan hama dan penyakit, serta gulma kurang mendapat perhatian petani tersebut, dan akan membahayakan tanaman tetangganya bila sampai menjadi sarang tikus (Sutikno *et al*, 2003).

Keadaan tersebut di atas perlu dicari solusinya dan untuk mengantisipasinya Balittra melakukan rekayasa kelembagaan yang disebut Usahatani Kooperatif (UK). Lembaga ini merupakan satu unit usaha, semacam koperasi produksi, di mana semua keputusan dan pengaturan sarana dan prasarana produksi, teknologi yang digunakan, sampai pemasaran hasil diatur dan diusahakan oleh lembaga. Lembaga ini

merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya yang umumnya mengalami stagnasi, bahkan tinggal menjadi lembaga papan nama saja tanpa aktivitas.

VISI DAN MISI

Visi

Usahatani kooperatif memiliki visi: **usahatani maju (modern) berkelanjutan di setiap lahan**. Visi ini menggambarkan cita-cita untuk tak membiarkan adanya lahan tidur atau terbengkelai dan berusaha mengusahakannya dengan teknologi maju (modern) sehingga produktivitas lahan meningkat secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Misi

Dari visi di atas, misi dari lembaga ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengusahakan agar tak ada lahan yang tak tergarap atau diusahakan seadanya sehingga tak terjadi gangguan hama dan penyakit. Bila ada lahan yang tidak terurus, maka lahan tersebut akan diusahakan oleh anggota usahatani kooperatif yang berminat atau lembaga ini sendiri.
2. Pemilihan komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan penggunaan bibit yang berkualitas baik.
3. Menyediakan prasarana dan sarana produksi, seperti: alsintan, bibit, pupuk, pestisida, dsb., serta memelihara jaringan tata air secara bersama.
4. Menerapkan teknologi terbaru secara efisien pada setiap lahan garapan anggota.

5. Menjauhi/melarang pembakaran lahan dalam penyiapan lahan.
6. Mengamankan gangguan penyakit dan hama, terutama tikus secara bersama.
7. Penanganan panen dan pasca panen secara benar untuk peningkatan mutu hasil pertanian.
8. Pemasaran bersama hasil pertanian untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi yang paling cocok adalah **koperasi**, karena selain memiliki motif ekonomi, juga memiliki fungsi sosial dan kekeluargaan (Hendrojogi, 2002). Meskipun demikian, motif ekonomi akan menjadi perhatian utama agar lembaga ini bergerak lebih dinamis. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan koperasi yang terlalu menonjolkan fungsi sosialnya mengalami stagnasi (kemandegan).

Perlu diketahui, usahatani kooperatif bukan merupakan koperasi seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang lebih mirip koperasi jasa, tetapi lembaga baru yang merupakan koperasi produksi.

Usahatani kooperatif merupakan satu kesatuan usaha yang menghimpun sejumlah usahatani individual dalam satu hamparan, di mana segala keperluan sarana dan prasarana, teknologi dan pemasaran hasil diatur oleh lembaga. Petani masih memiliki hak atas lahan dan hasilnya dengan kewajiban mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan lembaga dan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan.

Perbandingan antara usahatani korporasi (CF, *corporate farming*), usahatani individual dan usahatani kooperatif (UK, *cooperative farming*) adalah seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan karakteristik antara *Corporate Farming* (CF), Usahatani Individual dan Usahatani kooperatif (UK/*Cooperative Farming*).

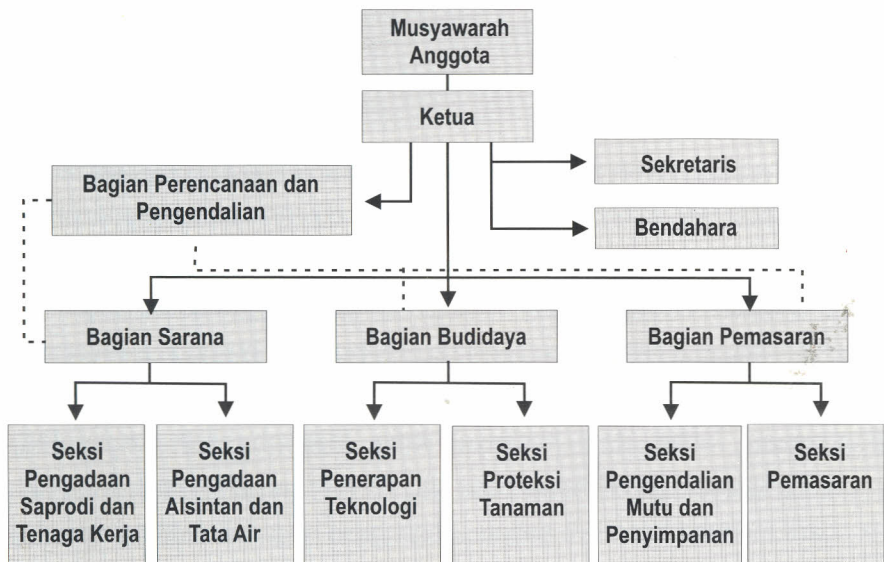
Hal	<i>Corporate Farming</i> (CF)	Usahatani Individual	Usahatani Kooperatif (UK)
Penguasaan Lahan	CF	Petani	Petani
Pengelolaan usaha	CF	Petani	Petani diatur UK
Pembiayaan	CF	Petani	Petani
Asal modal	CF	Petani/Pinjaman	Anggota/Sumber lain/ Pinjaman UK
Penyediaan Saprodi dan Alsintan	CF	Petani	UK
Teknologi yang digunakan	Teknologi maju	Tradisional	Teknologi maju
Pengawasan aplikasi teknologi	CF	Semua petani	UK
Pengawasan mutu hasil panen	CF	Petani	UK
Penguasaan hasil panen	CF	Petani	Petani
Pemasaran hasil	CF	Petani	Bersama melalui UK
Biaya manajemen	Tinggi/standar perusahaan	Tidak ada	Rendah/ditentukan anggota
Hak suara	Menurut besarnya saham	Tidak perlu	Satu orang satu suara
Pengusahaan lahan terlantar	CF	Dibiarkan/Bera	UK

Perbedaan utama antara CF dan UK adalah pada penguasaan asset lahan dan hasilnya, yaitu pada CF sepenuhnya dikuasai oleh badan usaha, sedangkan pada UK masih dikuasai petani. Petani hanya memberikan sedikit kontribusi untuk UK yang dikaitkan dengan pengembalian pinjaman setelah panen, jasa pemasaran dan iuran wajib per panen yang besarnya ditentukan musyawarah anggota. Dengan demikian hambatan psikologis penguasaan lahan dan hasilnya yang menyebabkan kegagalan pengembangan CF dapat diatasi pada UK. Perbedaan lain adalah pada CF hak suara menurut besarnya saham, sedangkan pada UK satu orang satu suara.

Sedangkan perbedaan utama dengan usahatani individual adalah: (1) penyediaan sarana produksi bibit, pupuk, dan traktor dilakukan oleh UK, sehingga lebih efisien dalam pembiayaannya dan tepat waktu, (2) aplikasi teknologi ditentukan dan diawasi dengan ketat oleh UK, dan (3) pemasaran hasil dilakukan bersama melalui UK, sehingga posisi tawar menawar petani lebih kuat dan petani akan memperoleh harga yang lebih baik.

2. Struktur Organisasi

Lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih secara demokratis oleh para anggotanya dalam Musyawarah (Rapat Tahunan) Anggota dan karenanya bertanggung-jawabkan hasil kerja dan tindakannya pada anggota. Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh empat Kepala Bagian, yaitu: Perencanaan, Sarana, Budaya dan Pemasaran (Bagan 1).



Bagan 1. Struktur Organisasi Usahatani Kooperatif

Tugas pokok dan wewenang dari bagian-bagian tersebut adalah:

- a. **Bagian Perencanaan:** bersama bagian-bagian lain, membuat rencana kegiatan tiap-tiap bagian yang sinkron dengan kegiatan bagian lain, sistematis, logis dan dinamis. Logis di sini diartikan sebagai menyesuaikan diri dengan kemampuan kelompok dalam segala hal dan dapat dicapai; jadi bukan rencana yang tinggi (mengawang-awang), ideal, tetapi tak dapat dicapai (*unattainable*), seperti yang sering terjadi saat ini pada lembaga-lembaga yang ada. Akan tetapi, rencana tersebut harus dinamis, dalam arti harus ada peningkatan pencapaian dari tahun ke tahun, meskipun kecil. Selain menghimpun rencana, juga bagian ini bertugas memantau/mengendalikan pelaksanaannya, dari waktu ke waktu, dan memperingatkan bagian lain yang melakukan penyimpangan dari rencana bersama ketua, atau melakukan koreksi/revisi rencana bila memang diperlukan.
- b. **Bagian Sarana:** bertugas mencari/menyediakan alsintan (traktor, thresher, dsb), tenaga kerja, sarana produksi dan pemeliharaan jaringan alsintan. Bagian ini membuat rencana bagiannya, serta melaksanakannya sesuai rencana/jadwal yang dibuat. Rencana yang lebih terinci dibuat bagian ini, seperti giliran pengolahan tanah dengan traktor per petani, jadwal pembersihan/pemeliharaan tata air, dsb.
- c. **Bagian Budidaya:** bertugas membuat rencana seperti tersebut di atas, dan merincinya menjadi lebih spesifik, seperti: jadwal giliran semai, tanam dan panen per petani. Dengan demikian tenaga kerja yang sedikit dapat dioptimalkan penggunaannya secara harmonis dan kekeluargaan, tanpa harus berebut. Selain itu, aplikasi teknologi baru yang sudah disepakati diawasi betul oleh Kepala Bagian ini. Contohnya, bila ada penyelewengan jatah pupuk, misalnya dari jatah 200 kg Urea hanya diaplikasikan 100 kg

saja, maka bagian ini akan melaporkannya kepada ketua untuk ditindak/dikenai sangsi. Demikian juga dengan aplikasi teknologi lainnya, sehingga penerapan teknologi dijamin dilakukan secara benar dan hasilnya diharapkan akan sesuai harapan. Proteksi tanaman merupakan tugas bagian ini, sehingga rencana dan pelaksanaan gropyokan tikus, pengawasan serangan hama harus dibuat oleh bagian ini.

- d. **Bagian Pemasaran.** Pemasaran masih merupakan titik terlemah dari sistem produksi dan distribusi pertanian. Bila bagian ini sukses memasarkan hasil pertanian dengan harga yang baik, maka adopsi teknologi bukan masalah lagi. Tetapi bila macet di sini, maka petani akan jera melaksanakannya. Karena buat apa memproduksi barang yang tidak/sulit laku, sementara biaya produksinya mahal. Untuk ini maka padi yang di tanam merupakan varietas yang berharga jual tinggi, dijual berasnya dalam kemasan plastik berlabel (bermerek) ke daerah yang memiliki selera sesuai dengan karakteristik beras tersebut. Padi varietas Margasari dan Martapura juga dapat diusahakan untuk memenuhi pasar lokal (Kalsel) dalam kemasan yang serupa. Dalam hal ini diperlukan pengendalian mutu gabah dan beras yang ketat. Hanya beras yang mempunyai spesifikasi mutu tinggi yang dijual dalam bentuk kemasan. Untuk ini diperlukan sentuhan teknologi mulai dari pemilihan benih, teknik budidaya dan teknologi pasca panen, termasuk kesesuaian atau *setting* alat processing yang akurat.

Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sering disebut sebagai pengurus, sedangkan bagian-bagian dalam struktur organisasi ini sering disebut manajer.

3. Mekanisme Kerja

Pada prinsipnya, segala kegiatan UK adalah oleh petani dan untuk petani, sehingga semua fungsi manajemen dilakukan oleh petani, melalui pengurus dan manajer. Mekanisme kerja usahatani kooperatif dalam hubungannya dengan anggota adalah sebagai berikut.

- a. Semua kebijakan, mulai dari pemilihan komoditas, teknologi yang digunakan, jadwal pengolahan lahan dan tanam, jadwal kegiatan lain, dibuat oleh pengurus UK, kemudian ditawarkan pada musyawarah anggota untuk dilakukan perbaikan dan persetujuan anggota. Segala hal yang telah disepakati dalam musyawarah anggota bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak.
- b. Petani diwajibkan untuk:
 - (1) mengikuti/melaksanakan segala ketentuan yang telah dimusyawarahkan dengan konsekuen.
 - (2) menggarap lahannya secara benar dan bertanggung jawab (tidak menelantarkan lahan/usahataninya).
 - (3) dalam hal petani tak sanggup mengusahakan lahannya, petani wajib menyerahkan hak pengusahaan lahannya pada UK. Selanjutnya UK akan menawarkan pada anggota yang sanggup menggarap dan bila tidak, akan dikerjakan oleh UK yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh anggota lain. Dalam hal ini, semua hasil menjadi milik UK yang pembagiannya ditentukan oleh kesepakatan bersama.
 - (4) menggunakan teknologi maju sesuai ketentuan yang disepakati.
 - (5) membayar semua kewajibannya (pinjaman saprodi, iuran wajib, dsb) tepat waktu sesuai kesepakatan.

c. Pengurus wajib memberikan pelayanan dalam hal:

- (1) membuat perencanaan kegiatan UK secara jelas dan terinci, meliputi jadwal palang pertanaman, pemeliharaan jaringan tersier, jumlah dan saat penyediaan sarana produksi, jadwal giliran penarikan lahan, pengaturan tenaga kerja, pengajuan kredit usahatani, pemasaran hasil, dsb., dan melaksanakannya secara konsisten.
- (2) penyediaan sarana produksi dengan kualitas baik.
- (3) penyediaan traktor dan alsintan lainnya.
- (4) membimbing dan mengawasi aplikasi teknologi maju oleh petani.
- (5) mengamati gejala serangan hama dan penyakit, serta melaporkannya pada petugas terkait.
- (6) membantu memasarkan hasil panen petani dengan cara mencari informasi pasar dan menghubungi pedagang.

d. Petani memiliki 100% hasil panennya dan memberikan kontribusi pendanaan seperti disepakati setiap habis panen.

e. Pengurus memiliki hak untuk menerima insentif

SUMBER DANA

Untuk dapat melaksanakan kegiatannya diperlukan modal usaha yang didapat dari iuran modal awal (uang pangkal), iuran per panen, jasa pinjaman saprodi, jasa pemasaran hasil panen, hasil lahan yang pengusaannya diserahkan pada UK, dan sumber lain yang legal, baik dari pemerintah maupun swasta.

Mengingat kemampuan permodalan petani yang sangat terbatas diperlukan bantuan modal awal dari pemerintah (pusat dan daerah), paling

tidak berupa sarana produksi yang pengembaliannya dijadikan modal UK. Bantuan yang paling rasional adalah untuk usahatani hortikultura (sayuran dan buah-buahan) di musim kemarau mengingat tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi dan memberikan pendapatan yang cukup berarti dalam waktu singkat (1-3 bulan). Suatu contoh, diversifikasi dengan tanaman tomat di pematang surjan seluas 0,125 ha (seperdelapan hektar) dapat memberikan pendapatan bersih Rp 3.685.500, hanya dengan pengorbanan biaya Rp 703.115. Jumlah sebesar itu cukup untuk modal usahatani baik padi maupun sayuran berikutnya.

MANAJEMEN ORGANISASI

Seperti diketahui, ada empat fungsi manajemen, yaitu: 1. Perencanaan (*Planning*), 2. Pengorganisasian (*Organizing*), 3. Pelaksanaan (*Actuating*) dan 4. Pengendalian (*Controlling*). Berikut ini secara garis besar akan diuraikan keempat fungsi tersebut pada UK.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan hal terpenting, karena kata orang bijak: "*kalau kita gagal membuat rencana yang baik, berarti merencanakan untuk gagal*". Perencanaan dibuat oleh masing-masing bagian, lalu dihimpun dan disempurnakan oleh Bagian Perencanaan, melalui rapat pengurus. Apabila UK masih berskala kecil (kurang dari 100 ha), bagian perencanaan dapat dihilangkan dan fungsinya dipegang oleh Ketua.

Tahap-tahap perencanaan dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. Tentukan komoditas apa yang akan diusahakan, untuk siapa dan kapan.

Komoditas yang diusahakan dipilih berdasarkan tingkat keunggulan kompetitifnya. Hasil penelitian (Sutikno *et al*, 2002) menunjukkan bahwa untuk lahan pasang surut sulfat masam, urutan keunggulan kompetitif tanaman adalah seperti pada Tabel 2. Nenas, meskipun secara finansial paling kompetitif, tapi petani banyak yang tidak bersedia mengusahakan dalam satu hamparan dengan padi, karena dikhawatirkan akan menjadi sarang tikus. Sedangkan jeruk, meskipun kalah kompetitif dari tomat dan lombok, tapi karena resiko serangan hama dan penyakit lebih rendah dan memerlukan pemeliharaan lebih ringan, maka lebih disukai petani, di samping juga sebagai semacam cadangan pensiun. Namun lombok dan tomat dapat dijadikan tanaman sela di antara jeruk. Padi Margasari meskipun kalah kompetitif dari tanaman hortikultura tetap akan diusahakan petani, karena merupakan kebutuhan pokok. Akan tetapi pengalaman dari satu desa di kawasan Terantang, pada Lahan-2, petani mulai meninggalkan padi setelah jarak antar baluran menjadi hanya 5 m (delapan balur per hektar), suatu hal yang harus diantisipasi di Lahan-1.

Tabel 2. Peringkat keunggulan kompetitif tanaman di lahan sulfat masam

Tipologi lahan pasang surut sulfat masam	Peringkat keunggulan kompetitif				
	1.	2.	3.	4.	5.
1. Tipe A	Jeruk	Kelapa	Padi lokal		
2. Tipe B	Nenas	Tomat	Lombok	Jeruk	Padi Margasari
3. Tipe C	Padi lokal	Kc. Tanah	Kedelai		

Sumber : Sutikno *et al*, 2002

Untuk siapa produk yang dihasilkan ditujukan, akan menentukan varietas dan teknologi yang digunakan. Sayuran untuk *super market* mensyaratkan bebas pestisida dan ini memerlukan teknologi tersendiri. Apalagi untuk tujuan ekspor, mungkin malah harus bebas dari bahan kimia, termasuk pupuk buatan, sehingga pertanian organik yang harus dilakukan.

Kapan dipasarkan, merupakan pertanyaan yang sering dilupakan oleh petani, bahkan penyuluh. Usahakan jangan sampai panen jatuh pada saat harga rendah, pilih saat panen di mana harga tinggi. Contoh, pada akhir musim kemarau, mulai Agustus harga tomat cukup baik, karena daerah lahan lain sudah tak memiliki air lagi untuk menanam. Pilih bulan Agustus sebagai bulan panen dan mundur tiga bulan untuk menentukan saat semai.

- b. Tentukan paket teknologi yang akan digunakan.
- c. Buat jadwal palang kegiatan usahatani.
- d. Buat jadwal pengajuan kredit usahatani dan proposalnya.
- e. Buat jadwal palang penyediaan sarana produksi.
- f. Tentukan jenis dan kuantitas sarana produksi.
- g. Rencanakan pemasaran hasil dengan menjajagi pedagang/pengusaha mitra, buat kontrak kerjasama pemasaran bila diperlukan.

2. Pengorganisasian

Dari struktur organisasi sudah jelas siapa yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan tertentu dan hak-haknya. Ketentuan ini tinggal dipatuhi bersama secara konsekuen, ikhlas dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat, diperlukan keseriusan dan ketepatan waktu seperti yang telah digariskan. Perubahan waktu pelaksanaan harus mempertimbangkan waktu kritis pertanaman, yang ditentukan oleh kondisi air seperti banjir, kekeringan dan keasinan, serta harga hasil panen (untuk hortikultura) agar terhindar dari harga yang merugikan akibat panen raya di ekosistem lain (lahan kering dan lebak).

4. Pengendalian

Fungsi manajemen ini sering dilupakan, padahal pengawasan atau pengendalian yang terus menerus akan sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan. Pengawasan mutu bibit, ketepatan aplikasi teknologi, pengamatan hama dan penyakit, pengendalian mutu hasil panen harus selalu dilakukan.

Setahun sekali, setelah panen padi musim kemarau, dilakukan evaluasi, mengenai seluruh kegiatan yang telah dilakukan, untuk melihat di mana letak kekurangannya dan bagaimana seharusnya. Hasil temuan evaluasi ini dibawa ke Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk dilakukan perbaikan dari rencana tahun sebelumnya.

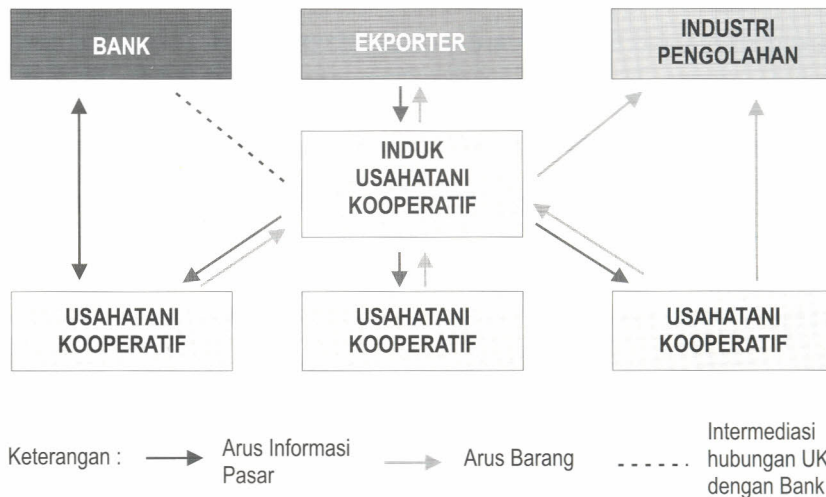
PENGEMBANGAN LEMBAGA

Perspektif ke depan

Usahatani kooperatif didisain bukan untuk satu kelompok tani, tapi untuk satu hamparan dari beberapa kelompok tani. Luas hamparan optimum belum diketahui, karena belum diadakan penelitian. Diperkirakan luasan sekitar 100 ha (tiga sampai empat kelompok tani) masih dapat dijangkau oleh kemampuan manajemen UK. Luasan yang terlalu sempit

akan menyebabkan kecilnya sumber pendapatan UK sehingga tak mampu memberi insentif yang wajar terhadap pengurus, sebaliknya kalau terlalu luas akan sulit dijangkau oleh manajemen UK yang tingkat pendidikannya kurang memadai.

Apabila telah terbentuk cukup banyak UK, maka perlu dibentuk Induk UK untuk mengkoordinasikan gerakan UK dalam program tertentu. Misalnya ada order permintaan atas suatu komoditas yang dapat diusahakan di UK, maka Induk UK dapat bertindak sebagai eksportir. Induk UK juga dapat berperan sebagai lembaga intermediasi antara UK dan pemberi pinjaman modal (Bank dan lembaga keuangan lain). Manajemen Induk UK terdiri atas para profesional yang berjiwa wiraswasta (*entrepreneur*), dinamis dan memiliki wawasan luas. Hubungan kerja ini seperti digambarkan pada Bagian 2.



Bagan 2. Hubungan kerja antara Usahatani Kooperatif, Induk Usahatani Kooperatif dan Agen Ekonomi Luar.

Masalah pengembangan

Integrasi beberapa kelompok tani tidak mudah, karena akan terbentur pada beberapa masalah antara lain (Sutikno *et al*, 2003):

1. **Egoisme kelompok.** Suatu kelompok tentu menghendaki yang jadi ketua berasal dari kelompoknya. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan penggiliran personalia Ketua setiap periode.
2. **Saling curiga.** Pengalaman menunjukkan adanya tendensi kecurigaan di kalangan petani meskipun dalam satu kelompok. Penggabungan antar kelompok dapat menimbulkan kecurigaan tentang menganak emaskan anggota kelompok ketuanya, atau pengurusnya. Untuk ini distribusi personalia pengurus harus meliputi semua kelompok dan transparansi dari pengurus sangat diperlukan.
3. **Profesionalisme yang rendah.** Akibat dari bagai-bagi jabatan pengurus dan penggiliran ketua dapat menyebabkan wakil pengurus yang ditunjuk kelompok menjadi tidak sesuai dengan kemampuannya.
4. **Modal.** Modal awal merupakan hal yang berat untuk ditanggung petani, mengingat kondisi perekonomian petani yang masih tergolong lemah. Mencari sumber permodalan saat ini juga sulit, terbukti dari realisasi KUT yang sangat rendah. Keharusan adanya agunan yang diminta bank menyebabkan lebih sulit lagi mendapatkan KUT. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan keharusan adanya agunan diganti dengan jaminan dari pemerintah daerah (PEMDA), sepanjang tingkat keberhasilan usahataniya tinggi, seperti usahatani hortikultura di musim kemarau. Pemberian jaminan PEMDA harus diikuti adanya supervisi teknis dari ahlinya. Contohnya, jaminan PEMDA untuk usahatani sayuran harus ada konsultan ahli tanaman sayuran dan pemasaran. Kesalahan selama ini

adalah memberikan bantuan tanpa supervisi teknis budidaya tanaman dan pemasaran.

5. **Sistem pemasaran yang berskala lokal.** Sampai saat ini sebagian besar produk pertanian Kalimantan Selatan masih berputar di dalam kawasan sendiri. Hal ini sangat menghambat pengembangan produksi, terutama padi unggul yang kurang sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Perluasan pasar merupakan keharusan dan sudah saatnya dilakukan rekayasa pengembangan sistem pemasaran ke luar daerah.

PENUTUP

Konsep UK ini dibuat sebagai titik awal dari revitalisasi kelembagaan pertanian yang tentu saja masih harus dilakukan penyempurnaan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Komunikasi lebih lanjut dengan peneliti sosial ekonomi Balittra akan sangat bermanfaat dalam pengembangan kelembagaan ini.

Dalam pengembangannya modifikasi dari konsep ini dapat dilakukan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrojogi, 2002. *Koperasi, azas-azas, teori dan praktek*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail, I.G., T. Alihamsyah, IPG. Widjaja-Adhi, Suwarno, T. Herawati, R. Taher, dan D.E. Sianturi (eds), 1994. *Sewindu (1985-1993) Penelitian Pertanian di Lahan Rawa, Kontribusi dan Prospek Pengembangan*. Proyek Penelitian Pertanian Lahan Pasang Surut dan Rawa, Swamps II, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Dep. Pertanian, Jakarta.

- mga 46 OK ✓
- Sutikno, H., M. Alwi, M. Thamrin dan Zaenuddin, 2002. Analisis keunggulan kompetitiv usahatani tanaman pangan di berbagai tipologi lahan pasang surut dan lebak. Laporan Hasil Penelitian Tahun 2001, Balittra, Banjarbaru.
- Sutikno, H., M. Alwi dan M. Thamrin, 2003. Perancangan dan uji diagnostik model usahatani kooperatif di daerah pasang surut. Laporan Hasil Penelitian Tahun 2002, Balittra, Banjarbaru.
- Widjaja-Adhi, I.P.G., K.Nugroho, D. Ardi S. dan A.S. Karama, 1992. Sumberdaya lahan rawa: Potensi, keterbatasan dan pemanfaatan. *Dalam* S. Partohardjono dan M. Syam (eds). Pengembangan Terpadu Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak. Risalah Pertemuan Nasional Pengembangan Pertanian Lahan Pasang Surut dan Rawa. Cisarua 3-4 Maret 1992, Puslibangtan-SWAMPS II. Bogor.



BALI

632
B